



*“Implementasi Peraturan Presiden
Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
di Lingkungan Ditjen Bina Adwil”*

Oleh :
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan
2018

**DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

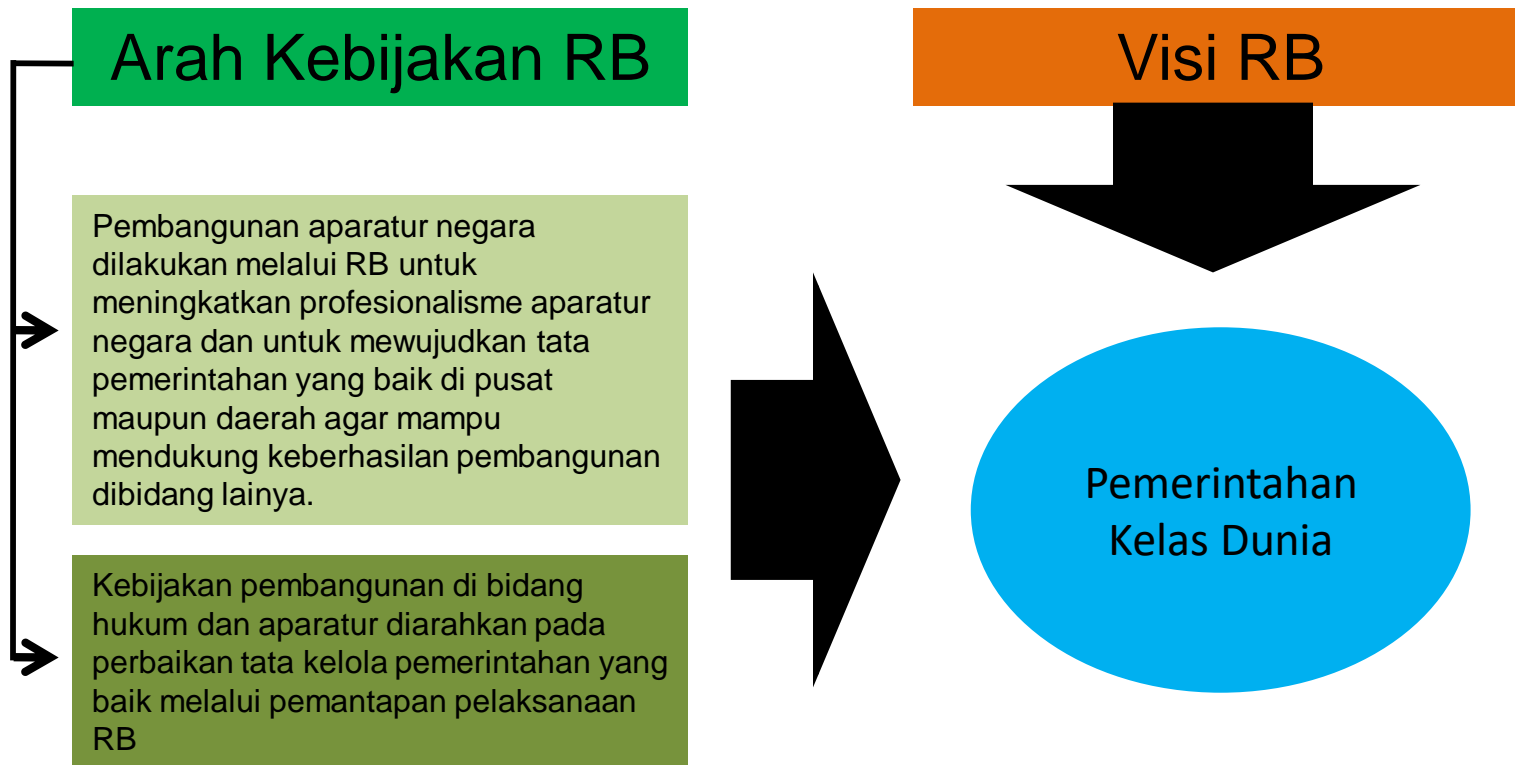
Permasalahan Birokrasi

1. Organisasi	➔	Belum tepat fungsi dan ukuran
2. Peraturan Perundangan	➔	Masih tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir
3. SDM Aparatur	➔	Pengelolaan belum optimal (profesionalisme, kinerja, dan organisasi) gaji belum mencerminkan beban tugas dan tgjwb
4. Kewenangan	➔	Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan
5. Pelayanan Publik	➔	Belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak WN
6. Pola Pikir	➔	Belum sepenuhnya mendukung birokrasi, pola pikir belum sepenuhnya melayani masyarakat

Tujuan Umum RB

1.	Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan
2.	Menjadikan negara yang memiliki most-improvement bureaucracy
3.	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
4.	Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi
5.	Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi
6.	Menjadikan birokrasi Indonesia entisipatif, proaktif dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis

Arah Kebijakan dan Visi RB

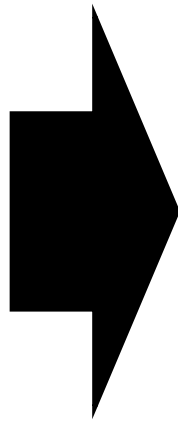


Misi RB

Visi RB



**Pemerintahan
Kelas Dunia**



Misi RB

Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sdm aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset dan culture set

Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif

Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien

Tujuan dan Sasaran RB

Tujuan RB

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang :

- Profesional dengan karakter adaptif
- Berintegritas
- Berkinerja tinggi
- Bersih dan bebas KKN
- Mampu melayani publik
- Netral
- Sejahtera
- Berdedikasi

Memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

Sasaran RB

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

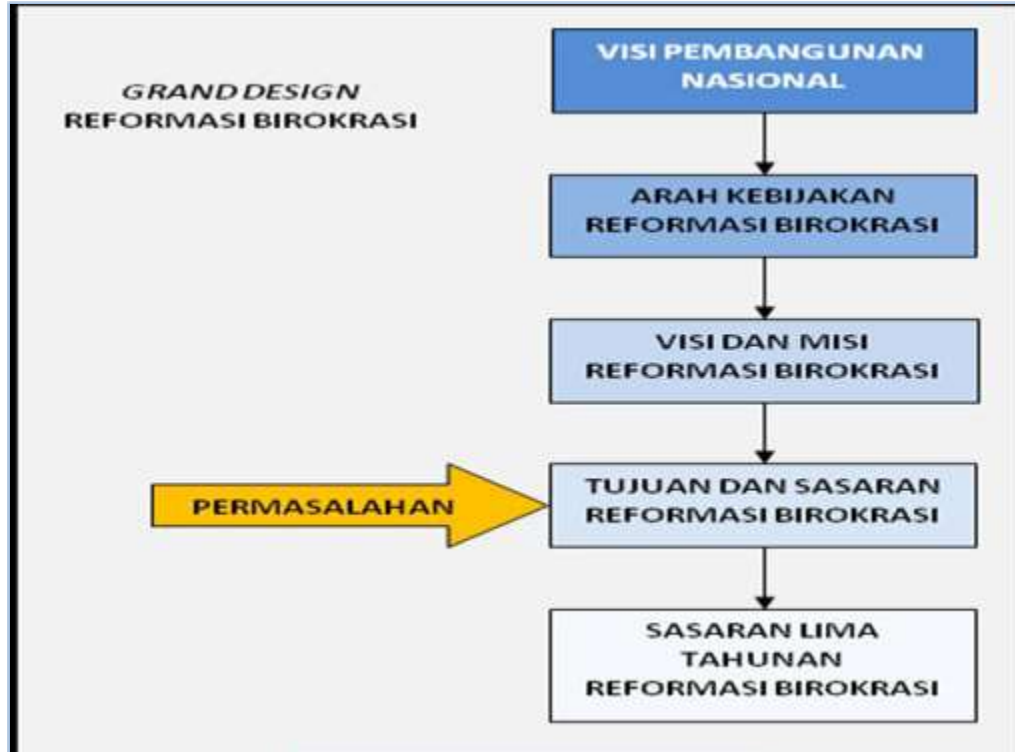
Meningkatkannya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Meningkatkannya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Kondisi Birokrasi yg Diinginkan



Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025

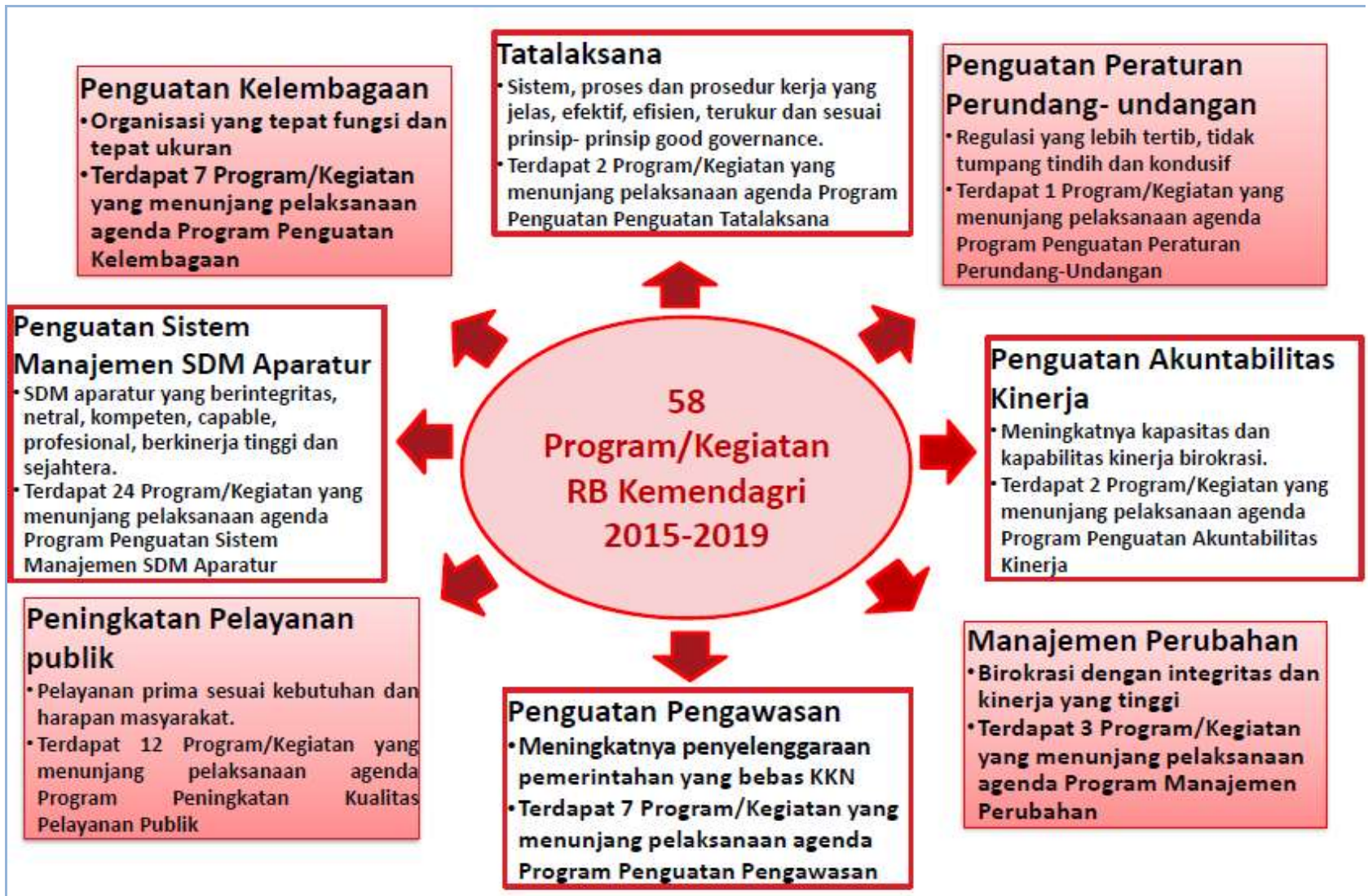


Road Map RB

Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan

Area	Hasil yang Diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tata laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera</i>
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Program/Kegiatan RB Kemendagri 2015-2019



Penyelenggaraan RB Kemendagri

Tim RB Kemendagri
(Kepmendagri No.
061.05 – 57 2018)



Tim RB Komponen
Ditjen Bina Adwil
(Kepmendagri 060-
077 Tahun 2017)

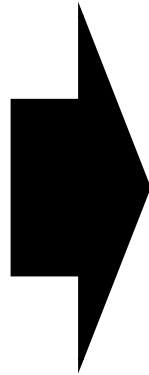
Visi : Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang **RESPECT** (Responsible, Effective, Smart, Professional, Efficient, Creative, and Trust)

Misi

1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Responsif terhadap Perubahan;
2. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Efektif dalam menggunakan Sumber Daya;
3. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Mampu Bekerja Cerdas dan Tuntas;
4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Profesional dan anti KKN;
5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Efisien dalam menggunakan Sumber Daya;
6. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Kreatif dan Modern;
7. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang Terpercaya.

**RENCANA KERJA GENERIK DAN AGENDA PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2018**

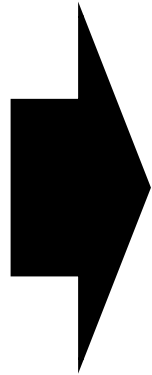
**Komponen
Pengungkit
RB Ditjen
Bina Adwil**



1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tatalaksana
6. Penataan Sistem Manajemen SDM ASN
7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

RENCANA KERJA GENERIK DAN AGENDA PRIORITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2018

**Komponen
Hasil RB
Ditjen Bina
Adwil**



1. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan Target Nilai Akuntabilitas Kinerja yang baik dan Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) yang baik.
2. Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN, dengan Target: Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) yang baik.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Target Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) yang baik.

Secara Umum, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017, Tim RB Kemendagri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-2524 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun Anggaran 2017 **telah melaksanakan seluruh Agenda Kerja Prioritas RB Kemendagri Tahun 2017** sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5259 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5923 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019 dan telah di evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB.
2. Evaluasi Pelaksanaan RB di lingkungan Kemendagri Tahun 2017 telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang dipimpin oleh Bapak Ronald Andrea Annas, selaku Ketua Tim Evaluator dan selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KemenPANRB, mulai bulan September s.d. Desember 2017.
3. Kemendagri telah mengirimkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5341/SJ, Tanggal 12 Oktober 2017, Hal Penyampaian *Evidence* Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5376/SJ, Tanggal 16 Oktober 2017, Hal Penyampaian *Evidence* RB Kemendagri Tahun 2017 sebagai tindaklanjut Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPANRB Nomor B/25/RB.04/2017, Tanggal 7 September 2017, Hal Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan Surat Deputi KemenPANRB Nomor B/21/AA.04/2017, Tanggal 7 September 2017, Hal Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.
4. Pemenuhan kekurangan *Evidence* RB Kemendagri Tahun 2017 juga telah disampaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri PANRB Nomor 061/9299/SJ, Tanggal 19 Desember 2017, Hal Penyampaian Dokumen *Evidence* Tambahan RB Kemendagri Tahun 2017.

Capaian Program Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Rencana Aksi Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemendagri pada Tahun 2017 :

1. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Percepatan Penyelesaian Segmen Batas Antar Daerah (total 977 Segmen) dan 355 Segmen dalam proses tahapan penyelesaian, melalui pelibatan Provinsi melalui Dekonsentrasi Penegasan Batas Daerah, Penggunaan Metode Kartometrik untuk daerah yang sulit dijangkau dan disurvei dan fasilitasi penyelesaian perselisihan segmen batas antar Kab/Kota oleh Gubernur dari semula 6 bulan menjadi 30 hari kerja;
2. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan untuk Perbaikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan telah terbentuk 531 PTSP Daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempersingkat waktu layanan, layanan secara elektronik, integrasi layanan dan mendorong pelimpahan wewenang Bupati/Walikota kepada PTSP dan Camat;
3. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait dengan dukungan percepatan kebijakan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah, melalui penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR dari 33 menjadi 11 izin dan percepatan waktu perizinan dari 981 menjadi 44 hari kerja;
4. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait dengan efektifitas kebijakan subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga, melalui pelayanan pengaduan subsidi tarif listrik berbasis *web*, serta pengelolaan tidak lanjut pengaduan masyarakat; dan
5. Pada Tahun 2017, Kemendagri telah melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait dengan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat seluas 7.287,52 Ha di 48 Kab/Kota percontohan, melalui konservasi lahan tidak produktif melibatkan 7.937 petani, serta pengembangan model penanganan lahan kritis



TERIMA KASIH